Katalog: 9302023.7371

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MAKASSAR MENURUT PENGELUARAN

2019-2023

VOLUME 10, 2024

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR

https://makassarkota.bps.go.id

Katalog: 9302023.7371

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MAKASSAR MENURUT PENGELUARAN

2019-2023

VOLUME 10, 2024

https://makassarkota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA MAKASSAR
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume 10, 2024

Katalog: 9302023.7371
ISBN: -
Nomor Publikasi: 73710.24005

Ukuran Buku: 21,5 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman: x+60 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Pembuat Cover:
Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Ilustrasi Kover:
Daris Azhar

Sumber Ilustrasi:
freepik.com; flaticon.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

https://makassarkota.bps.go.id

TIM PENYUSUN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MAKASSAR MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume 10, 2024

Pengarah:

Drs. Abdul Hafid, M.M

Penanggungjawab:

Drs. Abdul Hafid, M.M

Penyunting:

Drs. Muhdar, M.M.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Drs. Muhdar, M.M. • Dewa Ayu Srijayanti, SST.

Ammas Pualam Islamy, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Daris Azhar, S.Tr.Stat. • Dewa Ayu Srijayanti, SST.

https://makassarkota.bps.go.id

https://makassarkota.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar menurut Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kota Makassar. Publikasi ini menyajikan perkembangan perekonomian Kota Makassar secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2019 – 2023 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kota Makassar sehingga memungkinkan terbitnya buku ini, serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

https://makassarkota.bps.go.id

Makassar, April 2024

BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA MAKASSAR

KEPALA,

Drs. Abdul Hafid, M.M.

https://makassarkota.bps.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB 5

II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA 9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) 10
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) 12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P) 14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 17
2.5 Perubahan Inventori (PI) 20
2.6 Ekspor-Impor 23

III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MAKASSAR MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019-2023 25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran 26
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran 35
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga 35
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT 37
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah 38
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 40
3.2.5 Perubahan Inventori 41
3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa 42

IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA MAKASSAR 2019-2023 45
4.1 PDRB (Nominal) 46
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB 47
4.3 *Average Propensity to Consume (APC)* dan *Average Propensity to Save (APS)* 48
4.4 *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* 49

V. PENUTUP 51

LAMPIRAN 53

DAFTAR PUSTAKA 59

https://makassarkota.bps.go.id

https://makassarkota.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	8
Tabel 2.1	Jenis Belanja dan Deflator dalam PK-P	16
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023	27
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023	29
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023	31
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023	33
Tabel 3.5	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Makassar 2019 – 2023	36
Tabel 3.6	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Makassar 2019 – 2023	37
Tabel 3.7	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Makassar 2019 – 2023	39
Tabel 3.8	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Makassar 2019 – 2023	41
Tabel 3.9	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Makassar 2019 – 2023	42
Tabel 3.10	Perkembangan Net Eskpor Kota Makassar 2019 – 2023	43
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Makassar 2019 – 2023	46
Tabel 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Makassar 2019 – 2023	47

https://makassarkota.bps.go.id

Tabel Halaman

Tabel 4.3 *Average Prospensity to Consume* dan *Average Prospensity to Save* Tahun 2019 – 2023 48

Tabel 4.4 *Incremental Capital Output Ratio*, Kota Makassar 2019 – 2023 49

https://makassarkota.bps.go.id

https://makassarkota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR

Pertumbuhan ekonomi
5,31%

Konsumsi Rumah Tangga
50,02%

Konsumsi LNPRT
1,79%

Net Ekspor
-6,19%

PDRB 2023
226.902,79
Miliar Rupiah

Konsumsi Pemerintah
7,78%

Perubahan Inventori
-0,03%

PMTB (Investasi)
46,63%

BAB I

PENDAHULUAN

https://lmakassarkota.kemenkumham.go.id

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Meskipun demikian, PDRB Pengeluaran dihitung secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)[1]. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side)* dan sisi permintaan (*demand side)* barang dan jasa.

Secara konsep[2] penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

https://makassarkota.bps.go.id

[1]*Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)*
[2]*Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa *(output)* yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

https://makassarkota.bps.go.id

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat[3], yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan "riil"
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **"output akhir (*final output*)"**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan*Keynesian* sbb:

$$\mathbf{Y = C + GFCF + \Delta\ Inventori + X - M}$$

Y (*Income*)	= PDRB Produksi
C (*Consumption*)	= Konsumsi akhir
GFCF (*Gross Fixed Capital Formation*)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

https://makassarkota.bps.go.id

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (*SNA*) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Makassar menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

https://makassarkotabps.go.id

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan, dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kualitas PDRB;
c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[4];
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

https://makassarkota.bps.go.id

[4] *SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"*

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan

  a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases,* yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

https://makassarkota.bps.go.id

h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

https://makassarkota.bps.go.id

Tabel 1.1 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

https://makassarkota.bps.go.id

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran[5]. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

https://makassarkota.bps.go.id

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

[5]*Untuk Kota Makassar yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah*

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

https://makassarkota.bps.go.id

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatanSKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

https://makassarkota.bps.go.id

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

https://makassarkota.bps.go.id

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

https://makassarkota.bps.go.id

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Makassar mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kota Makassar mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kota Makassar; b). PK-P Kota Makassar yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Makassar.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Makassar tahunan adalah:

a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan, dan Bappeda
b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

https://makassarkota.bps.go.id

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P Kota Makassar Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Tabel 2.1 Jenis Belanja dan Deflator dalam PK-P

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

https://makassarkota.bps.go.id

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

https://makassarkota.bps.go.id

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "Bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

a. Output industri konstruksi, BPS
b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

https://makassarkota.bps.go.id

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)= Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metode Tidak Langsung:

  Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

  Pendekatan Ekstrapolasi: PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

https://makassarkota.bps.go.id

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

https://makassarkota.bps.go.id

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
f. Ternak untuk tujuan dipotong;
g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

https://makassarkota.bps.go.id

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku =Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)-
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

https://makassarkota.bps.go.id

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

https://makassarkota.bps.go.id

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antarresiden wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kota Makassar terdiri dari:

a. Ekspor keluar provinsi/Kota Makassar
b. Impor dari luar provinsi/Kota Makassar.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Makassar didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Makassar diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metode tidak langsung.

https://makassarkota.bps.go.id

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MAKASSAR MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019-2023

https://makassarkota.bps.go.id

Perubahan struktur ekonomi Kota Makassar sebagai akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 s.d 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan nasional dan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Makassar sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

https://makassarkota.bps.go.id

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (*SNA*) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Makassar atas dasar harga berlaku di tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 10,02 persen, yakni dari 208.953,79 miliar Rupiah menjadi 226.902,79 milliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhannya lebih kecil, yakni dari 133.132,60 miliar Rupiah menjadi 140.197,90 miliar Rupiah, atau terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, untuk 2018 dan 2019 perekonomian Kota Makassar masih tumbuh di atas 8 persen, yakni sebesar 8,42 persen dan 8,79 persen. Namun, pada 2020 Kota Makassar mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,27 persen. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 selama tahun 2020. Selanjutnya, pada 2021 sampai 2022 kondisi perekonomian mulai membaik karena kasus covid-19 mulai berkurang dan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan sehingga Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi

sebesar 4,47 persen dan 5,40 persen. Namun untuk 2023, Kota Makassar mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,31 persen.

Peningkatan volume ekonomi yang terjadi tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha ini tumbuh setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar didominasi pertumbuhan komponen Pembentukan Modal tetap Bruto, yang menyumbang hampir separuh total PDRB.

Tabel 3.1 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

*(*Miliar Rp*)*

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	91.405,36	93.001,93	97.357,47	103.621,57	113.504,96
2. Konsumsi LNPRT	3.296,66	3.239,76	3.255,89	3.687,21	4.058,92
3. Konsumsi Pemerintah	15.669,46	15.419,64	16.291,99	16.141,87	17.644,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	85.679,31	90.104,81	94.576,60	99.426,44	105.805,70
5. Perubahan Inventori	(408,35)	(451,55)	(493,37)	280,42	(63,31)
6. Net Ekspor	(17.212,38)	(22.981,59)	(20.670,52)	(14.221,73)	(14.047,94)
PDRB	**178.430,06**	**178.332,99**	**190.318,07**	**208.953,79**	**226.902,79**

* angka sementara
** angka sangat sementara

https://makassarkota.bps.go.id

Perkembangan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Makassar pada periode 2019 – 2023 dapat dilihat dari Tabel 3.1 dan Gambar 1. Pada periode tahun 2019 dan 2020 PDRB Kota Makassar atas dasar harga berlaku mengalami penurunan, yakni sebesar 178.430,06 miliar Rupiah (2019) dan 178.332,99 miliar Rupiah (2020). Penurunan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu menjadi sebesar 190.318,07 miliar Rupiah. Selanjutnya, pada 2022 dan 2023 PDRB Kota Makassar kembali mengalami peningkatan menjadi 208.953,79 miliar Rupiah (2022) dan 226.902,79 milir Rupiah (2022). Hal ini disebabkan mulai pulihnya perekonomian di Kota Makassar karena berkurangnya kasus covid-19 dan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)

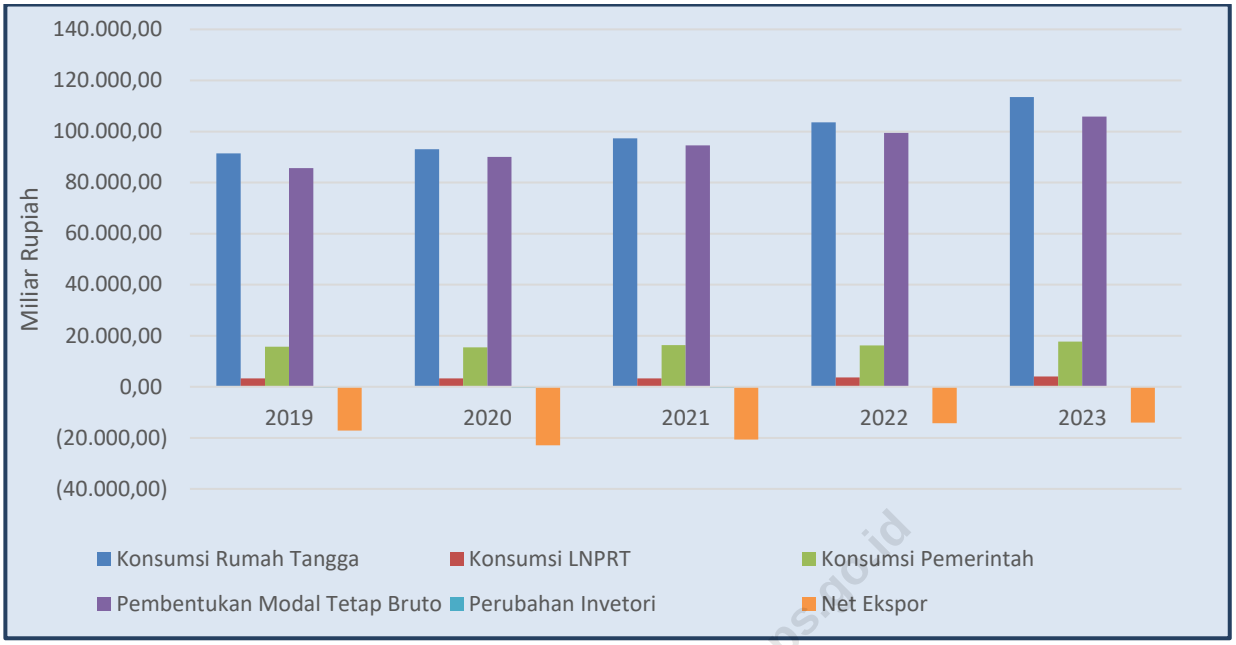

https://makassarkota.bps.go.id

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Makassar pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 3.2 dan Gambar 2 berikut ini.

Dari Tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kota Makassar menurun pada tahun 2019 dan 2020, yakni sebesar 122.465,83 miliar Rupiah (2019) dan 120.905,75 miliar Rupiah (2020). Sementara itu, pada 2021 terjadi peningkatan menjadi sebesar 126.312,83 miliar Rupiah akibat pandemi Covid-19 sudah mulai berakhir. Selanjutnya, pada 2022 dan 2023 kembali terjadi peningkatan menjadi sebesar 133.132,60 miliar Rupiah (2021) dan 140.197,90 miliar Rupiah (2022) karena kondisi perekonomian yang berangsur membaik.

Tabel 3.2 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58.881,87	58.519,48	60.334,10	62.438,25	65.701,79
2. Konsumsi LNPRT	1.883,42	1.796,64	1.779,07	1.977,87	2.133,33
3. Konsumsi Pemerintah	8.864,18	8.629,89	8.960,41	8.733,35	9,302,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	60.372,40	61.230,83	62.601,98	64.336,62	66.204,32
5. Perubahan Inventori	(157,01)	(172,92)	(232,84)	229,57	(51,03)
6. Net Ekspor	(7.379,02)	(9.098,17)	(7.129,89)	(4.583,06)	(3.093,41)
PDRB	**122.465,83**	**120.905,75**	**126.312,83**	**133.132,60**	**140.197,90**

* angka sementara
** angka sangat sementara

https://makassarkota.bps.go.id

Gambar 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)

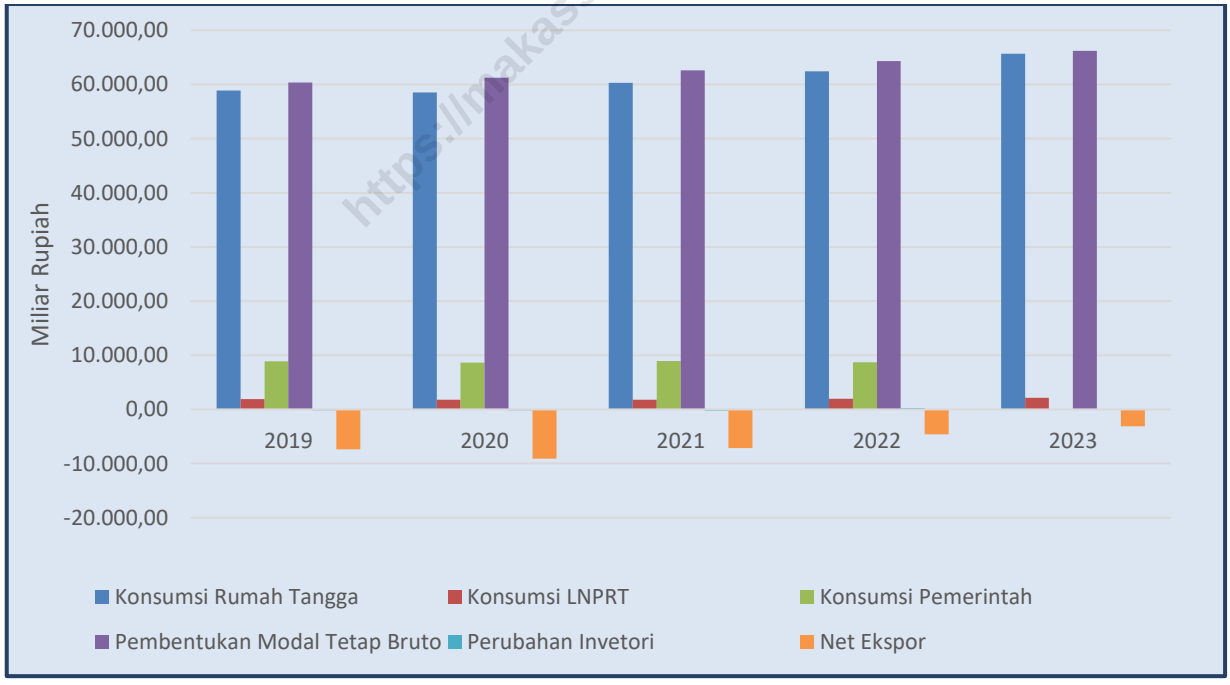

Gambar 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)

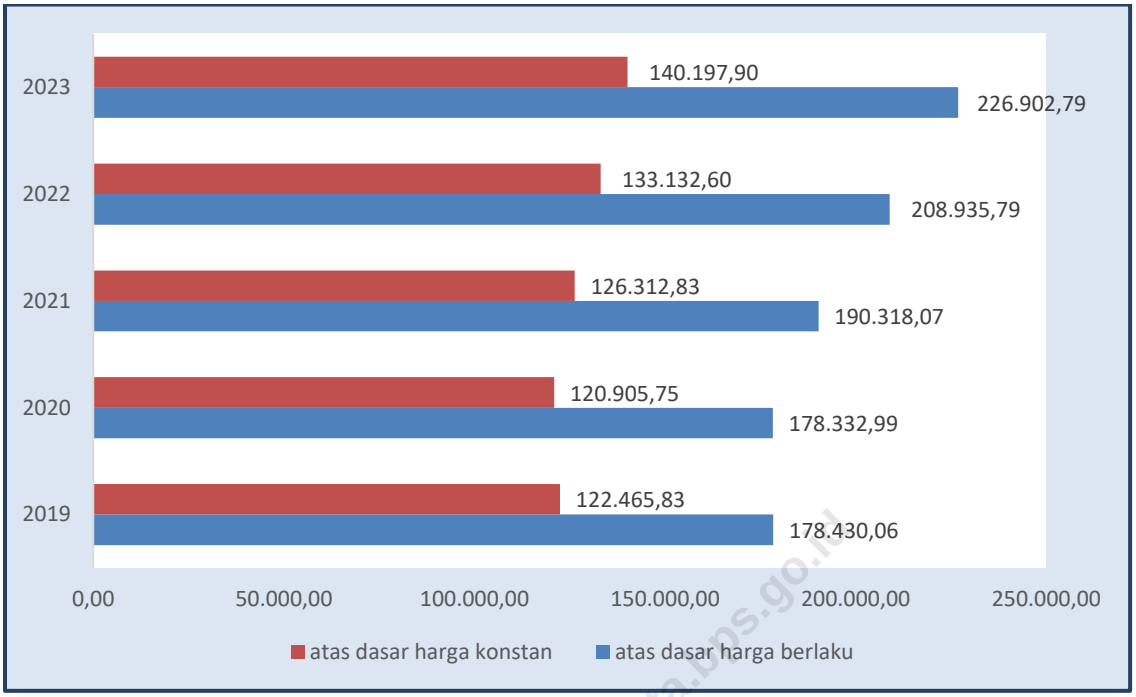

https://makassarkota.bps.go.id

Dari Gambar 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan pada 2023.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

(%)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	51,23	52,15	51,16	49,59	50,02
2. Konsumsi LNPRT	1,85	1,82	1,71	1,76	1,79
3. Konsumsi Pemerintah	8,78	8,65	8,56	7,73	7,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	48,02	50,53	49,69	47,59	46,63
5. Perubahan Inventori	(0,23)	(0,25)	(0,26)	0,13	(0,03)
6. Net Ekspor	(9,65)	(12,89)	(10,86)	(6,81)	(6,19)
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://makassarkota.bps.go.id

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2019 – 2023, PDRB Kota Makassar sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pada 2023, pengeluaran untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga berkontribusi sebesar 50,02 persen. Pengeluaran untuk akitivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 46,63 persen pada tahun 2023. Komponen konsumsi pemerintah juga berkontribusi cukup besar yakni 7 hingga 9 persen selama lima tahun terakhir. Komponen net ekspor memberikan kontribusi negatif terhadap PDRB selama lima tahun terakhir kecuali tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) selama lima tahun terakhir berada pada rentang 7 – 9 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Sementara itu, komponen konsumsi LNPRT berfluktuasi selama lima tahun terakhir, yaitu berkisar dari 1 – 2 persen. Pada tahun 2019 hingga 2021 kontribusi komponen ini mengalami penurunan dari 1,85 persen pada 2019 menjadi 1,71 persen pada 2021. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan sosial sehingga terjadi penurunan aktivitas LNPRT yang berimbas terhadap penurunan pengeluaran. Selain itu, tahun 2020 dan 2021 juga bukan merupakan tahun politik bagi Kota Makassar sehingga partai politik tidak banyak melakukan kegiatan. Namun pada 2022 dan 2023 kontribusi komponen ini meningkat menjadi 1,76 persen dan 1,79 yang disebabkan meningkatnya aktivitas kegiatan keagamaan setelah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.

Di sisi lain, pada tahun 2019 – 2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen net ekspor, menunjukkan nilai negatif yang berarti impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi "defisit" atau merugi. Hal ini dikarenakan Kota Makassar bukan merupakan daerah penghasil tetapi hanya menjadi wilayah transit bagi perdagangan.

Gambar 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

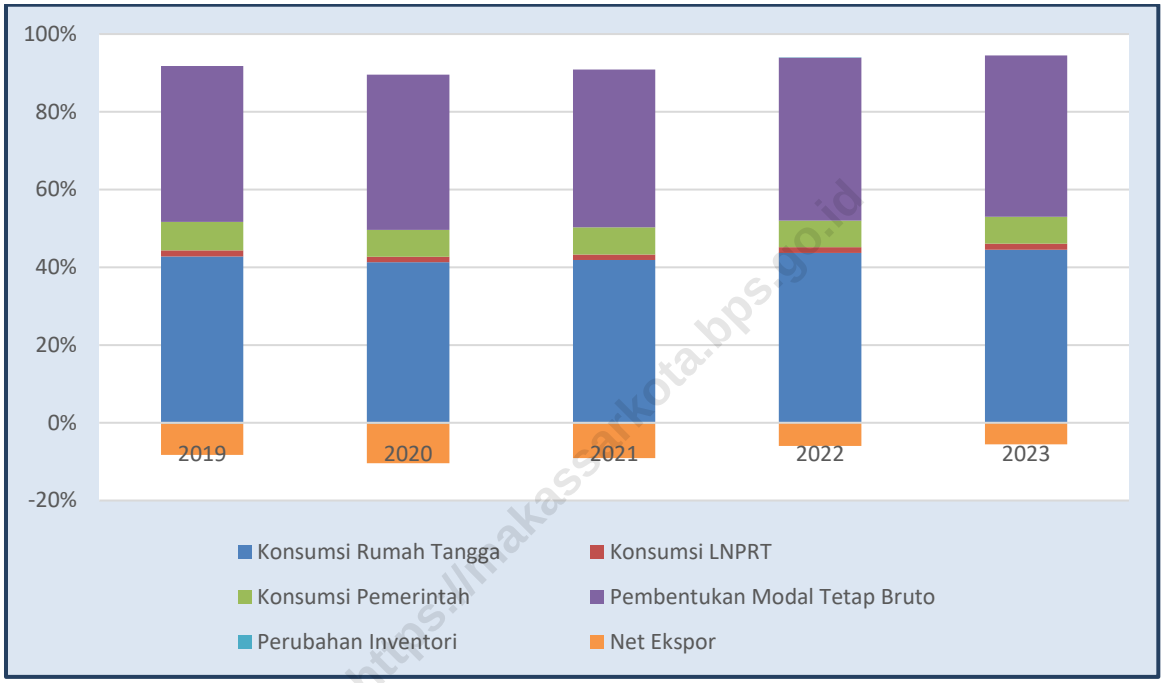

https://makassarkota.bps.go.id

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.4, selama periode tahun 2019 - 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami penurunan, yakni sebesar 8,79 persen (2019) dan -1,27 persen (2020) karena adanya pandemic covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 Kota Makassar mulai meningkat sebesar 4,47 persen karena kondisi perekonomian yang mulai membaik. Selanjutnya, pada 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi sudah mulai stabil menjadi 5,40 persen dan 5,31 persen. Dari Gambar 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

(%)

Komponen Pengeluaran,*Expenditure item*	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga, *Household Consumption*	5.98	(0.62)	3.10	3.49	5,23
2. Konsumsi LNPRT, *NPISH Consumption*	23.06	(4.61)	(0.98)	11.17	7,86
3. Konsumsi Pemerintah, *Government Consumption*	(0.14)	(2.64)	3.83	(2.53)	2,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto, *Gross Fixed Capital Formation*	6.97	1.42	2.22	2.77	2,90
5. Perubahan Inventori, *Changes of Inventory*	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor, *Net Export*	-	-	-	-	-
PDRB , *GRDP*	**8,79**	**-1,27**	**4,47**	**5,40**	**5,31**

https://makassarkota.bps.go.id

Gambar 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

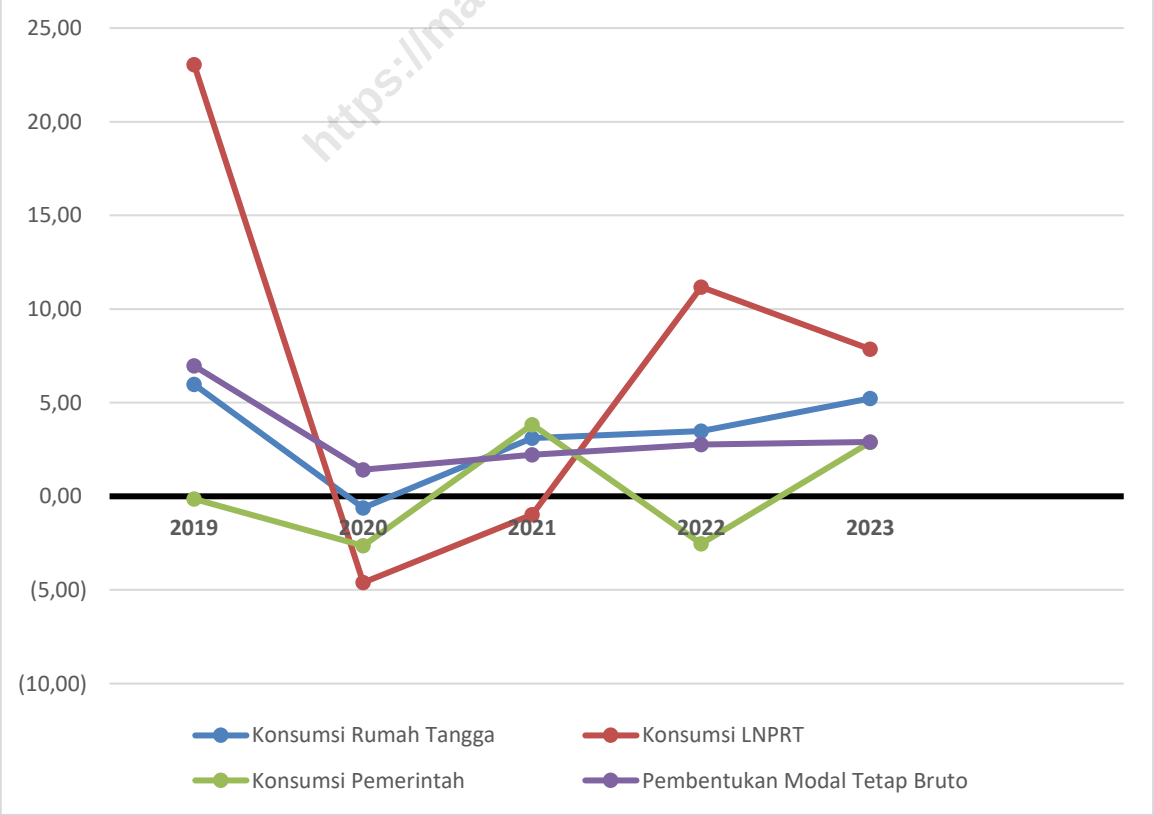

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2023 adalah Konsumsi LNPRT. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kemunculan kasus covid-19 dan tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat pada 2023 sehingga aktivitas keagamaan dan kegiatan sosial mulai meningkat. Komponen yang terus mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Hal ini dikarenakan sektor konstruksi yang tetap tumbuh positif sehingga terjadi peningkatan PMTB. Sementara itu, pertumbuhan terendah adalah konsumsi pemerintah namun masih bernilai positif yaitu 2,89 persen.

https://makassarkota.bps.go.id

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Makassar untuk periode 2019 – 2023.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Makassar, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Makassar maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

https://makassarkota.bps.go.id

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019 dan 2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan sisi nominal (atas dasar harga berlaku) namun secara riil (atas dasar harga konstan) mengalami penurunan. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu pendorong terjadinya penurunan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga secara riil. Selanjutnya, pada 2021 sampai 2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga kembali mengalami peningkatan karena kasus covid-19 mulai berkurang dan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan sehingga perekonomian secara

umum mulai bergeliat disertai jumlah penduduk yang meningkat. Demikian juga pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, sehingga daya beli masyarakat meningkat.

Tabel 3.5 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Makassar 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga	91.405,35	93.001,93	97.357,47	100.621,57	113.504,96
a. ADHB *(*Miliar Rp*)*					
b. ADHK 2010 *(*Miliar Rp*)*	58.881,87	58.519,48	60.334,10	62.438,25	65.701,79
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB *)*	51,23	52,15	51,16	49,59	50,02
Rata-rata konsumsi per-Kapita *(*Ribu Rp*)*	60,09	65,36	68,20	72,35	76,95
a. ADHB *(*Juta Rp*)*					
b. ADHK 2010 *(*Juta Rp*)*	38,71	41,12	42,26	43,60	44,54
Pertumbuhan[6]	5,98	-0,62	3,10	3,49	5,23
a. Total konsumsi RT					
b. Perkapita	5,08	6,24	2,77	3,16	2,16
Jumlah penduduk *(000* orang*)*	1.521	1.423	1.428	1.432	1.475

Selama lima tahun terakhir, proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB berfluktuasi cenderung menurun dari tahun 2019 - 2023, yaitu 51,23 persen (2019), 52,15 persen (2020), 51,16 persen (2021), 49,59 persen (2022) dan 50,02 persen (2023). Menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga merupakan langkah menuju perbaikan karena pengeluaran masyarakat mulai beralih ke investasi.

Pada tahun 2019 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 5,98 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar -0,62 persen (2020); 3,10 persen (2021), 3,49 persen (2022) dan 5,23 persen (2023). Sementara itu pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 5,08 persen (2019); 6,24 persen (2020); 2,77 persen (2021); 3,16 persen (2022); dan 2,16 persen (2023). Dari data tersebut nampak bahwa terjadi peningkatan total konsumsi "riil" rumah tangga pada 2023. Hal ini terjadi karena meningkatnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya kasus covid-19 dan pendapatan masyarakat juga semakin membaik.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan menurut atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2019, setiap rumah tangga di Kota Makassar menghabiskan dana sekitar 60,09 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 65,36 juta Rupiah (2020); 68,20 juta Rupiah (2021); 72,35 juta Rupiah (2022); dan

https://makassarkota.bps.go.id

[6] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

76,95 juta Rupiah (2023). Pengeluaran perkapita atas dasar harga Konstan (2010) juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Makassar 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	3.296,66	3.239,76	3.255,89	3.687,21	4.058,92
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	1.883,42	1.796,64	1.779,07	1.977,87	2.133,33
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	1,85	1,82	1,71	1,76	1,79
Pertumbuhan *(ADHK 2010)*	23,06	-4,61	-0,98	11,17	7,86

https://makassarkota.bps.go.id

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemic covid-19. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 3.296,66 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 menurun menjadi 3.239,76 miliar rupiah dan 3.255,89 miliar rupiah. Pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan penurunan kasus covid-19 menyebabkan pengeluaran LNPRT Kembali meningkat pada 2022 dan 2023 menjadi 3.687,21 miliar rupiah dan 4.058,92. Hal ini disebabkan karena peningkatan aktivitas keagamaan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berturut-turut adalah 23,06 persen (2019), -4,61 persen (2020), -0,98 persen (2021), 11,17 persen (2022), dan 7,86 persejn (2023).

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena adanya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi kontraksi karena adanya pandemic yang menyebabkan beberapa Lembaga dan tempat ibadah tidak beroperasi. Selanjutnya, pada 2021 masih terjadi kontraksi namun tidak sebesar tahun sebelumnya

karena masih adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan pada 2022 dan 2023 kembali meningkat karena adanya pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan, keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit, puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah, universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasapertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

https://makassarkota.bps.go.id

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 15.669,46 miliar rupiah, Namun pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami penurunan menjadi 15.149,64 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran selama pandemic covid-19. Selanjutnya, pada 2021 pengeluaran akhir pemerintah kembali meningkat karena berkurangnya kasus covid-19, menjadi sebesar 16.219,99 miliar rupiah. Pada 2022 pengeluaran pemerintah kembali mengalami penurunan menjadi 16.141,87 miliar rupiah karena belanja pegawai pemerintah mengalami kontraksi, kemudian pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 17.644,45 miliar rupiah.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada 2019 kontribusinya mencapai 8,78 menurun menjadi 8,65 persen (tahun 2020); 8,56 persen (2021); setelah itu menurun pada tahun 2022

dan 2023 yaitu 7,73 persen dan 7,78 persen dibandingkan 2021. Hal ini terjadi karena pada 2019 pemerintah kembali melakukan efisiensi anggaran sehingga proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB menurun. Pada 2020 kembali terjadi penurunan karena dilakukan efisiensi anggaran untuk menangani pandemic covid-19. Selain itu, penurunan konsumsi pemerintah juga disebabkan oleh turunnya realisasi belanja barang dan jasa serta pegawai karena adanya penundaan kegiatan kementerian dan lembaga serta perubahan kebijakan pemberian THR yang tidak melibatkan pejabat negara dan eselon 1 dan 2. Selanjutnya, pada 2021 masih mengalami penurunan karena meskipun kasus covid-19 mulai berkurang namun masih dilakukan efisiensi anggaran. Pada 2022 kontribusi komponen ini kembali mengalami penurunan dan pertumbuhan bernilai negatif. Hal disebabkan karena belanja atau serapan anggaran masih rendah dan belanja pegawai pemerintah mengalami kontraksi.

Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Makassar 2018 – 2023

https://makassarkota.bps.go.id

U r a i a n	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	15.669,46	15.419,64	16.219,99	16.141,87	17.644,45
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	8.864,18	8.629,89	8.960,41	8.733,35	9,302,91
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	8,78	8,65	8,56	7,73	7,78
Konsumsi Pemerintah per-kapita *(Juta Rp)*					
a. ADHB	10,30	10,84	11,41	11,27	11,96
b. ADHK 2010	5,83	6,06	6,28	6,10	6,31
Pertumbuhan[7]					
a. Total konsumsi pemerintah	-0,14	-2,64	3,83	-2,53	6,52
b. Konsumsi perkapita	-0,99	4,07	3,49	-2,84	3,44
Jumlah penduduk *(000 org)*	1.521	1.423	1.428	1.432	1.475

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

[7] *Diturunkan dari perhitungan PDRBatas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[8]. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019 – 2023 berfluktuasi cenderung menurun dari 6,97 persen (2019) menjadi 2,90 persen (2023), sementara di tahun lainnya masing-masing 1,42 persen (2020); 2,24 persen (2021); dan 2,77 persen (2022). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena adanya pembangunan gedung dan peningkatan fasilitas publik, seperti trotoar dan perbaikan jalan.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup rendah selama tiga tahun terakhir, PMTB merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan positif di tengah kondisi pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan tetap berjalannya berbagai proyek selama pandemi dan tetap meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, pada 2022 kasus covid 19 mulai berkurang sehingga perekonomian kembali bangkit. Hal ini membuat belanja modal baik kendaraan maupun aset PMTB lainnya oleh pemerintah dan swasta mulai meningkat.

https://makassarkota.bps.go.id

[8] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

Tabel 3.8 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Makassar 2019 – 2023

U r a i a n	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	85.679,31	90.104,81	94.576,60	99.426,44	105.805,70
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	60.372,40	61.230,83	62,601,98	64.336,62	66.204,32
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	48,08	50,53	49,69	47,59	46,63
Struktur PMTB [9]					
a. Bangunan *(%)*	*88,74*	*89,22*	*89,61*	*87,02*	*87,43*
b. Non Bangunan *(%)*	*11,26*	*10,78*	*10,39*	*12,98*	*14,38*
Total PMTB *(%)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*
Pertumbuhan[10] (%)					
a. Bangunan	10,30	2,81	2,47	0,05	3,70
b. Non Bangunan	-14,28	-1,73	0.30	26,36	-2,47
Total PMTB	6,97	1,42	2,24	2,77	2,90

https://makassarkota.bps.go.id

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

[9] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*
[10] *Diturunkan dari perhitungan PDRBatas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

Tabel 3.9 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Makassar 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	-408,35	-451,55	-493,37	280,42	-63,31
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	-157,01	-172,92	-232,84	229,57	-51,03
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-0,23	-0,25	-0,26	0,13	-0,03

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2019 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar -408,35 miliar rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar -451,55 miliar rupiah dan -493,37 miliar rupiah. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 280,42 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena setelah adanya pelonggaran PPKM, produksi barang hasil industri dan persediaan di hotel atau usaha lain mengalami peningkatan dimana sebagian barang yang sudah diproduksi belum laku terjual dan barang persedian di perusahaan belum habis digunakan sehingga barang tersebut disimpan sebagai stok di akhir tahun. Kemudian, di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi -63,31 miliar rupiah.

https://makassarkota.bps.go.id

Sejalan dengan nilai perubahan inventori, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Makassar juga berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, proporsi perubahan inventori adalah -0,23 persen (2019), selanjutnya -0,25 persen (2020), -026 persen (2021), 0,13 persen (2022), dan -0,03 persen (2023). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penanaman modal pada tahun 2021.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Makassar, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh

badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Sementara itu, aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Makassar sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Makassar di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Makassar terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kota Makassar lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

https://makassarkota.bps.go.id

Net ekspor merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor. Net ekspor yang bernilai positif menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada impor. Sementara itu, jika net ekspor bernilai negatif maka nilai impor yang lebih besar daripada ekspor.

Tabel 3.10 Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar 2019 – 2023

U r a i a n	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor	(17.212,38)	(22.981,59)	(20.670,52)	(14.221,73)	(14.047,94)
a. ADHB *(Miliar Rp)*	(7.379,02)	(9.098,17)	(7.129,89)	(4.583,06)	(3.093,41)
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*					
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	(9,65)	(12,89)	(11,07)	(6,93)	(6,19)

Secara total, dalam kurun waktu 2019 – 2023 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai yang negatif setiap tahun. Pada tahun 2019 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -17.212,38 miliar rupiah menjadi -22.981,59 pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 – 2023 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -20.670,52 miliar rupiah; -14.221,73 miliar rupiah; dan -14.047,94 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku, nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga

konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, masing-masing tahun sebesar -7.309,09 miliar rupiah (2019); -9.098,17 miliar rupiah (2020); -7.129,89 miliar rupiah (2021); 4.583,06 miliar rupiah (2022); dan -3.093,41 miliar rupiah (2023). Kecenderungan selama lima tahun terakhir selalu menunjukkan posisi "defisit" atau merugi. Hal ini dikarenakan Kota Makassar bukan merupakan daerah penghasil tetapi hanya menjadi wilayah transit bagi perdagangan.

https://makassarkota.bps.go.id

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA MAKASSAR 2019-2023

https://makassarkota.bps.go.id

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disjikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Makassar, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Makassar 2019 – 2023

https://makassarkotabps.go.id

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB *(Miliar Rp)*					
- ADHB	178.430,06	178.332,99	190.318,07	208.935,79	226.902,79
- ADHK 2010	122.465,83	120.905,75	126.312,83	133.132,60	140.197,90
PDRB perkapita *(Ribu Rp)*					
- ADHB	117,30	125,32	133,31	145,89	153,90
- ADHK 2010	80,51	84,97	88,48	92,96	95,09
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	7,87	5,53	4,13	5,06	2,29
Jumlah penduduk *(000 org)*	1.521	1.423	1.428	1.432	1.474

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Makassar 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*					
a. Rumah tangga	91.405,36	93.001,93	97.357,47	103.621,57	113.504,96
b. LNPRT	3.296,66	3.239,76	3.255,89	3.687,21	4.058,92
c. Pemerintah	15.669,46	15.419,64	16.219,99	16.141,87	17.644,45
Jumlah	110.371,47	111.661,33	116.833,35	123.450,65	135.208,33
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	178.430,06	178.332,99	190.318,07	208.935,79	226.902,79
Proporsi	61,86	62,61	61,39	59,09	59,59

https://makassarkota.bps.go.id

4.3 AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume, APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save, APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$APS = \frac{S}{Y_d}, \qquad APC = \frac{xCAPS}{Y_d}$$

Dimana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel. Perlu diketahui pula bahwa APC + APS = 1

https://makassarkota.bps.go.id

Tabel 4.3 ***Average Propensity to Consume*** **dan** ***Average Propensity to Save*** **Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021*	2022**	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel (Y_d) *(Miliar Rp)*	178.430,06	178.332,99	190.318,07	208.935,79	226.902,79
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	91.405,35	93.001,93	97.357,47	103.621,57	113.504,96
Total Konsumsi LNPRT (ADHB) *(Miliar Rp)*	3.296,66	3.239,76	3.255,89	3.687,21	4.058,92
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) *(Miliar Rp)*	15.669,46	15.419,64	16.291,99	16.141,87	17.644,45
Total Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*	110.371,47	111.661,33	116.833,35	123.450,65	135.208,33
APC	0,62	0,63	0,61	0,59	0,60
Tabungan *(Miliar Rp)*	67.058,59	66.671,66	73.484,72	85.485,14	91.694,46
APS	0,38	0,37	0,39	0,41	0,40

*Keterangan: * sementara ** sangat sementara*

4.4 *INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)*

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital,modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

https://makassarkota.bps.go.id

Tabel 4.4 ***Incremental Capital Output Ratio,*** **Kota Makassar 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	122.465,83	120.905,75	126.312,83	133.132,60	140.197,90
Perubahan (miliar rupiah)	9.897,42	1.560,08	5.407,08	6.819,77	7.065,3
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	60.372,40	61.230,83	62.601,98	64.336,62	66.204,32
ICOR	6,09	39,31	11,57	9,43	9,37

https://makassarkota.bps.go.id

BAB V

PENUTUP

https://makassarkota.bps.go.id

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 s.d 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Makassar pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 s.d 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Makassar terhadap ekonomi luar daerah.

https://makassarkota.bps.go.id

LAMPIRAN

https://makassarkota.bps.go.id

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

JENIS PENGELUARAN	PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2019	*2020*	*2021*	*2022**	*2023***
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	91.405.355,17	93.001.926,92	97.357.472,67	103.621.568,13	113.504.960,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.296.663,52	3.239.761,30	3.255.888,18	3.687.209,83	4.058.924,85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15.669.456,14	15.419.637,30	16.291.989,09	16.141.874,25	17.644.449,45
Pembentukan Modal Tetap Bruto	85.679.307,64	90.104.812,34	94.576.603,88	99.426.442,26	105.805.700,46
Perubahan Inventor	(408.346,85)	(451.554,04)	(493.365,96)	280.424,60	(63.307,47)
Net Ekspor Barang dan Jasa	(17.212.378,41)	(22.981.591,05)	(20.670.522,57)	(14.221.726,78)	(14.047.938,99)
PDRB	178.430.057,22	178.332.992,77	190.318.065,29	208.935.792,29	226.902.788,87

*Catatan: *) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

https://makassarkota.bps.go.id

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2019 – 2023

JENIS PENGELUARAN	PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2019	*2020*	*2021*	*2022**	*2023***
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58.881.867,63	58.519.481,90	60.334.100,17	62.438.247,45	65.701.785,72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.883.420,24	1.796.638,70	1.779.073,80	1.977.870,72	2.133.331,36
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.864.177,64	8.629.885,50	8.960.410,11	8.733.346,03	9.302.912,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto	60.372.400,64	61.230.831,83	62.601.980,11	64.336.623,38	66.204.315,15
Perubahan Inventor	(157.013,20)	(172.916,49)	(232.841,75)	229.571,90	(51.033,83)
Net Ekspor Barang dan Jasa	(7.379.023,88)	(9.098.169,41)	(7.129.894,78)	(4.583.061,33)	(3.093.407,80)
PDRB	122.465.829,07	120.905.752,03	126.312.827,67	133.132.598,14	140.197.903,47

*Catatan: *) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

https://makassarkota.bps.go.id

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2018 - 2022

JENIS PENGELUARAN	Distribusi PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2019	*2020*	*2021*	*2022**	*2023***
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,23	52,15	51,16	49,59	50,02
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,85	1,82	1,71	1,76	1,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,78	8,65	8,56	7,73	7,78
Pembentukan Modal Tetap Bruto	48,02	50,53	49,69	47,59	46,63
Perubahan Inventor	(0,23)	(0,25)	(0,26)	0,13	(0,03)
Net Ekspor Barang dan Jasa	(9,65)	(12,89)	(10,86)	(6,81)	(6,19)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Catatan: *) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

https://makassarkota.bps.go.id

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Makassar 2018 - 2022

JENIS PENGELUARAN	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2019	*2020*	*2021*	*2022**	*2023***
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,98	-0,62	3,10	3,49	5,23
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	23,06	-4,61	-0,98	11,17	7,86
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,14	-2,64	3,83	-2,53	2,89
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,97	1,42	2,24	2,27	2,90
Perubahan Inventor	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	8,79	-1,27	4,47	5,40	5,31

*Catatan: *) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

https://makassarkota.bps.go.id

https://makassarkota.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://makassarkota.bps.go.id

Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

_____,*Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.

Profil Ekonomi Rumahtangga 1998, Jakarta 1999.

Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stock*s, Netherlands, 1992.

Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.

Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

United Nations, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

_____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

https://makassarkota.bps.go.id

https://makassarkota.bps.go.id

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

https://makassarkota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR

Jl. Prof. Abdurrahman Basalaman I, Kel. Karampuang,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar 90231
Telp/Fax: (0411) 442698 ; Email: bps7371@bps.go.id
Homepage: http://makassarkota.bps.go.id